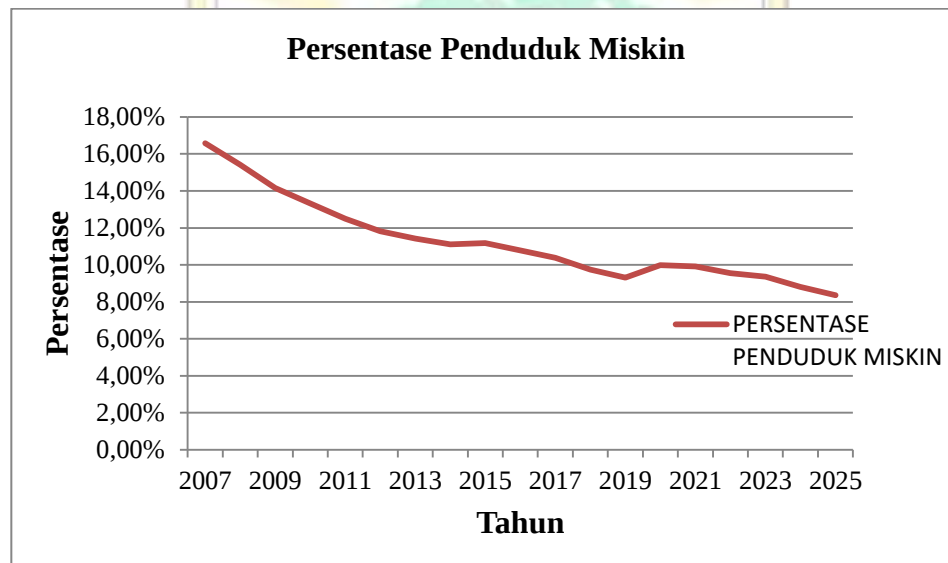


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah utama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Keterbatasan ekonomi rumah tangga seringkali menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan anak, baik dalam bentuk keterlambatan sekolah, putus sekolah, maupun rendahnya aspirasi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat penting dalam menentukan akses dan keberlanjutan pendidikan anak (Martsha & Disman, 2024).



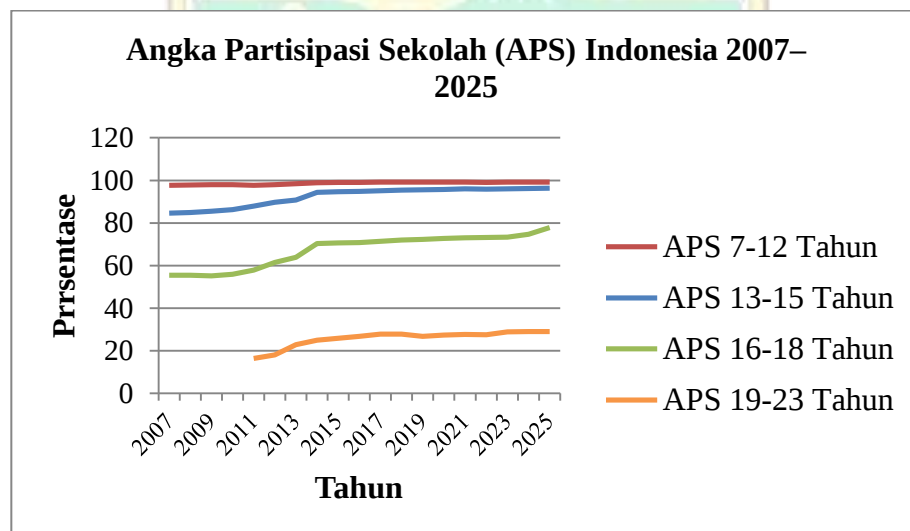
Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2007-2025

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah, 2026)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2026) persentase penduduk miskin di Indonesia selama periode 2007–2025 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2007, tingkat kemiskinan tercatat masih berada di atas 16%, kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai sekitar 8% pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat

serta dampak dari berbagai program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, kemiskinan masih menjadi permasalahan penting di Indonesia karena jumlah penduduk miskin masih tergolong besar. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2025 masih terdapat sekitar 23 juta penduduk miskin di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan.

Pada rumah tangga miskin, pendidikan sering kali dianggap sebagai kebutuhan sekunder karena pendapatan keluarga lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin memiliki risiko lebih tinggi mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan kualitas sumber daya manusia antara kelompok masyarakat miskin dan non miskin. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dapat memperbesar kemungkinan seseorang tetap berada dalam lingkaran kemiskinan karena individu dengan pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan keterampilan dan akses terhadap pekerjaan yang layak (Alya *et al.*, 2024).



Gambar 1. 2 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2007-2025

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah, 2026)

Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) Indonesia tahun 2007–2025 pada Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada kelompok usia sekolah dasar relatif tinggi dan stabil di atas 97%, yang berarti hanya sekitar kurang dari 3% anak usia sekolah dasar yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan. Namun, semakin tinggi jenjang pendidikan, tingkat partisipasi sekolah cenderung menurun sehingga proporsi anak yang tidak bersekolah justru semakin meningkat. APS usia 13-15 tahun meningkat dari 84,65% pada tahun 2007 menjadi 96,30% pada tahun 2025, yang berarti anak usia 13-15 tahun yang tidak berpartisipasi sekolah masih sebesar 15,35% pada tahun 2007 dan turun menjadi 3,70% pada tahun 2025. Sementara itu, APS usia 16-18 tahun meningkat dari 55,49% menjadi 77,86%, namun angka tersebut mengindikasikan bahwa sekitar 44,51% anak usia 16–18 tahun pada tahun 2007 dan masih sekitar 22,14% pada tahun 2025 tidak berpartisipasi dalam pendidikan pada jenjang tersebut. Kondisi yang lebih memprihatinkan terlihat pada kelompok usia 19–23 tahun, di mana meskipun APS mengalami peningkatan dari 16,48% pada tahun 2011 menjadi 29,13% pada tahun 2025, hal ini justru menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia tersebut, yaitu sekitar 83,52% pada tahun 2011 dan masih sebesar 70,87% pada tahun 2025, tidak berpartisipasi dalam pendidikan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi masih menjadi tantangan bagi masyarakat, khususnya kelompok rumah tangga miskin.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi pendidikan mengalami peningkatan, masih terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam mengakses dan mempertahankan pendidikan, terutama pada rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai intervensi melalui program perlindungan sosial yang tidak hanya bertujuan mengurangi kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses terhadap pendidikan. Salah satu program yang dikembangkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH).



Gambar 1. 3 Perkembangan Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia Tahun 2007–2020

Sumber: Kementerian Sosial RI (diolah, 2026)

Berdasarkan Gambar 1.3 perkembangan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan cakupan penerima manfaat selama periode 2007–2020 yang diikuti dengan peningkatan alokasi anggaran program. Pada awal pelaksanaan PKH tahun 2007, jumlah penerima manfaat masih sebesar 387.947 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Seiring dengan perluasan pelaksanaan program, jumlah penerima PKH terus mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 5,9 juta KPM pada tahun 2016 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,6 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2017 jumlah penerima meningkat menjadi 6.228.810 KPM dengan anggaran bantuan sosial sebesar Rp 11,3 triliun. Peningkatan cakupan program semakin terlihat pada tahun 2018, di mana jumlah penerima PKH mencapai 10.000.232 KPM atau sekitar 10 juta keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17,5 triliun. Meskipun pada tahun 2019 jumlah penerima mengalami sedikit penurunan menjadi 9.841.270 KPM, alokasi anggaran meningkat menjadi Rp 32,7 triliun. Pada tahun 2020, jumlah penerima kembali mencapai sekitar 10 juta KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 36,9 triliun. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa PKH mengalami perluasan cakupan

dan peningkatan dukungan anggaran yang signifikan sebagai salah satu program perlindungan sosial pemerintah dalam menjangkau keluarga miskin dan rentan di Indonesia (Kemensos, 2021).

Fenomena tersebut memperlihatkan sebuah temuan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Di satu sisi, jumlah penerima dan alokasi anggaran PKH terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, namun di sisi lain, Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi masih relatif stagnan dan tergolong rendah, terutama pada kelompok usia 19-23 tahun yang hingga tahun 2025 masih terdapat sekitar 70,87% yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, meskipun APS kelompok usia tersebut baru mencapai sekitar 29%. Kesenjangan antara besarnya investasi pemerintah melalui PKH dengan lambatnya peningkatan partisipasi pendidikan pada jenjang lanjut ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas program tersebut dalam mendorong keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga miskin. Kondisi inilah yang menjadikan penelitian mengenai pengaruh PKH terhadap partisipasi pendidikan anak menjadi penting untuk dilakukan, sebab besarnya anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih baik.

Peningkatan cakupan penerima PKH tersebut menunjukkan bahwa program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan akses pendidikan masyarakat miskin. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam bidang pendidikan, keluarga penerima manfaat diwajibkan memastikan anak tetap bersekolah sesuai dengan ketentuan wajib belajar yang ditetapkan pemerintah Hasanah (2018). Melalui mekanisme bantuan tunai bersyarat, PKH menjadi salah satu bentuk perlindungan

sosial yang membantu rumah tangga miskin meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan. Dengan adanya dukungan bantuan tersebut, keluarga penerima manfaat memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan investasi pendidikan anak dan meningkatkan keberlanjutan sekolah (OECD, 2019).

Di samping program PKH, partisipasi pendidikan anak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi rumah tangga. Karakteristik kepala keluarga seperti tingkat pendidikan dan jenis kelamin turut mempengaruhi pengambilan keputusan keluarga terhadap pendidikan anak, hal ini sejalan dengan Tatang (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki keinginan pendidikan yang lebih besar bagi anaknya. Selain itu, kondisi tempat tinggal seperti wilayah perkotaan atau perdesaan dan lokasi geografis juga berpengaruh terhadap aksesibilitas fasilitas pendidikan Purnastuti (2012). Kondisi hunian rumah tangga yang meliputi status kepemilikan rumah, akses terhadap listrik dan air bersih, jenis bahan bakar memasak, serta kualitas dinding turut mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang berdampak pada kemampuan keluarga dalam membiayai dan mendukung keberlangsungan pendidikan anak Filmer & Pritchett (2001). Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan dalam menganalisis pengaruh PKH terhadap partisipasi pendidikan anak agar estimasi yang dihasilkan lebih akurat dan tidak bias.

Di sisi lain, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PKH dalam bidang pendidikan belum sepenuhnya konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif terhadap akses dan keberlanjutan pendidikan anak. Martsha & Disman (2024) menyatakan bahwa bantuan sosial bersyarat melalui PKH mampu meningkatkan partisipasi sekolah, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, meskipun dampaknya relatif lebih lemah pada jenjang menengah atas. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Isnani & Hendri (2014) yang menunjukkan bahwa PKH membantu keluarga penerima

manfaat dalam memenuhi kebutuhan sekolah, meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan anak, serta mengurangi angka putus sekolah.

Penelitian oleh Mulyasri & Hasmira (2021), Hudang *et al.* (2024), Atmaja dan Pangaribowo (2022) dalam Martsha & Disman (2024) menemukan bahwa bantuan PKH belum memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendidikan anak. Mulyasri & Hasmira (2021) menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena sebagian dana bantuan lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Hudang *et al.* (2024) menunjukkan bahwa meskipun PKH dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, peningkatan tersebut belum mampu mendorong capaian pendidikan anak secara signifikan. Temuan ini diperkuat oleh Atmaja dan Pangaribowo (2022) dalam Martsha & Disman (2024) yang menemukan bahwa PKH belum mampu meningkatkan partisipasi sekolah anak usia 7-18 tahun maupun terhadap pengurangan pekerja anak.

Selain menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian terdahulu juga memiliki fokus kajian yang beragam. Hartarto & Wardani (2023) meneliti pengaruh PKH terhadap aspirasi pendidikan orang tua dan menemukan bahwa program tersebut mampu meningkatkan harapan pendidikan anak di masa depan. Sementara itu, Susilo & Wahyudi (2020) meneliti dampak PKH pada wilayah perdesaan dan menemukan bahwa PKH tidak berpengaruh signifikan, bahkan cenderung berhubungan negatif terhadap partisipasi pendidikan menengah atas, berbeda dengan Program Indonesia Pintar (PIP) yang justru berpengaruh positif dan signifikan. Hidayatina & Garces-Ozanne (2019) juga lebih menitikberatkan pada hubungan antara bantuan sosial, pendidikan, dan pekerja anak. Perbedaan fokus tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian belum secara khusus mengkaji pengaruh PKH terhadap partisipasi pendidikan anak dengan cakupan data rumah tangga berskala nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan empiris mengenai pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap partisipasi pendidikan anak di Indonesia. Selain menghasilkan temuan yang belum konsisten, penelitian terdahulu

juga menggunakan indikator pendidikan yang berbeda-beda, seperti capaian pendidikan, kualitas pendidikan, aspirasi pendidikan, maupun pekerja anak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap partisipasi pendidikan anak di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap partisipasi pendidikan anak di Indonesia?
2. Bagaimana perbedaan tingkat partisipasi pendidikan anak antara rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan non penerima PKH berdasarkan data IFLS 5 tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap partisipasi pendidikan anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat partisipasi pendidikan anak antara rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan non penerima PKH berdasarkan data IFLS 5 tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap partisipasi pendidikan anak di Indonesia. Serta hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah hasil perbendaharaan bacaan ilmiah.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk

meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan anak, khususnya dari rumah tangga miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap partisipasi pendidikan anak di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada anak dari rumah tangga miskin dan rentan, baik yang menerima maupun tidak menerima bantuan PKH. Variabel utama dalam penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai variabel independen dan partisipasi pendidikan anak sebagai variabel dependen.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel *control* untuk mengurangi potensi bias akibat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi partisipasi pendidikan anak. Variabel *control* yang digunakan meliputi wilayah tempat tinggal, lokasi geografis, jenis kelamin kepala keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, status kepemilikan rumah, bahan bakar memasak, kualitas dinding, listrik, air bersih. Variabel-variabel tersebut digunakan sebagai indikator kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan karakteristik demografis.

Penelitian ini menggunakan data sekunder *Indonesian Family Life Survey* (IFLS) gelombang 5 tahun 2014 yang bersifat *cross-section* dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode *Propensity Score Matching* (PSM), dengan regresi logit sebagai estimator *propensity score*. Ruang lingkup penelitian ini mencakup aspek sosial dan ekonomi dalam konteks pendidikan di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai aspek-aspek dasar yang mendasari penelitian serta memperjelas arah dan fokus studi yang dilakukan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori, kajian penelitian terdahulu, keterkaitan antar variabel, dan kerangka konseptual. Pada bagian ini diuraikan variabel-variabel yang digunakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), partisipasi pendidikan anak, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, beserta model analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan, termasuk jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, serta rancangan analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Propensity Score Matching* (PSM), dengan regresi logit sebagai estimator *propensity score*, untuk mengidentifikasi pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap partisipasi pendidikan anak. Bab ini juga memperinci langkah-langkah teknis yang dilakukan dalam pengolahan dan analisis data penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis statistik, uji model, serta interpretasi hasil penelitian. Pada bagian ini juga dibahas keterkaitan hasil analisis dengan teori dan penelitian terdahulu serta menjawab rumusan masalah yang diajukan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyimpulkan temuan utama dari penelitian, menjawab tujuan penelitian, serta memberikan saran yang relevan bagi pengembangan ilmu, kebijakan, dan penelitian selanjutnya terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan partisipasi pendidikan anak.